

## DAFTAR PUSTAKA

### Literatur

- Abdurrahman,. *Metode Penelitian Hukum*. Rineka Cipta, Jakarta, 2003.
- Arliman, Laurentius. *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat* . Deepublish, Yogyakarta, 2015.
- Asshuddique, J. (2011). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Azwar, S. (1997). *Metode Penelitian Jilid I*. Jogjakarta: Pustaka Pelajar.
- El-Muhtaj, Mazda. *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*. Kencana Prenadia Media Grup, Jakarta, 2005.
- Efendi, Junaedi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiri*, Kencana, Jakarta, 2016
- Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta, 2004.
- Hamzah, Candra. M. *Penjelasan Hukum tentang Bukti Permulaan yang Cukup*. Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Jakarta, 2014.
- Harahap, M. Y. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyelidikan dan Penyidikan*. Sinar Grrafika, Jakarta, 2004.
- \_\_\_\_\_. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- \_\_\_\_\_. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*. Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Marzuki, Peter. M. *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010.
- Makarao, Muhammad, T. *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*. Ghalia Indonesia, Bogor 2010.
- Manan, Bagir. *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Alumni, Bandung, 2001
- \_\_\_\_\_. *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*. Ghalia Indonesia, Bogor 2004.
- Muis, Abdul. *Hukum Kepolisian dan Kriminalistik*. Pustaka Reka Cipta, Bandung: 2021
- Muladi, *Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep, dan Implikasinya*, Rafika Aditama, Bandung, 2005.

- Nagara, Aditya. *Kamus Bahasa Indonesia*. Bintang Usaha Jaya, Surabaya, 2000.
- Poernomo, Bambang. (1982). *Pandangan terhadap Asas-asas Umum Hukum Acara Pidana*. Yogyakarta : Liberty.
- Prayitno, Kuat. P., *Pendidikan Kewarganegaraan*. Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto:2015.
- Prodjodikoro, Wiryono. (1967). *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Sumur Bandung.
- Purnama, I. K.. *Hukum Kepolisian: Sejarah dan Peranan POLRI dalam penegakan Hukum serta Perlindungan HAM*. Refika Aditama, Bandung, 2018.
- Rahardjo, Satjipto. . *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Genta Publishing, Jogjakarta, 2009.
- \_\_\_\_\_. *Polisi, Sipil, dalam Perubahan Sosial di Indonesia*. Yogyakarta: Kompas, Jakarta, 2000.
- Rahmad Riyadi A., *Hukum Acara Pidana*. Raja Grafindo, Jakarta, 2019.
- \_\_\_\_\_. (2009). *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Rustamaji, Muhammad. *Dekonstruksi Asas Praduga Tak Bersalah*. Thafa Media, Yogyakarta, 2019.
- Sadjijono. *Bab-Bab Pokok Tentang Hukum Administrasi*. Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2011.
- Salam, Moh. F.. *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*. CV Mandar Maju, Bandung, 2001.
- Samidjo. (1985). *Pengantar Hukum Indonesia*. Bandung: CV. Armico.
- Samosir, Djisman. *Hukum Acara Pidana*. Nuansa Amalia, Bandung, 2018.
- Sarwono, Jonathan. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Graha Ilmu, Yogyakarta, 2006.
- Simajuntak, Nikolas. *Acara pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 2009.
- Soekanto, Soerjono.. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000.
- Sofiani, T. (2020). *Perlindungan Hukum Pekerja Rumah Tangga Berbasis Hak Konstitusional*. Yogyakarta: Deepublish.
- Sofyan, Andi. M. *Hukum Acara Pidana*. Kencana, Jakarta, 2004.

Suhasril, M. T. (2004). *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Sumardjono, Maria.. *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi Dan Implementasi*. Kompas, Jakarta, 2006.

Suseno, F. M. (2001). *Etika Politik:Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Utomo, Warsi. H.. *Hukum Kepolisian di Indonesia*. Prestasi Pustaka, Jakarta, 2018.



## **Tesis/Jurnal**

- Darmansyah, P. (2013). Perlindungan Hak Tersangka Terhadap Penangkapan Pelaku Tindak Pidana Pencurian. *Jurnal Ilmiah Universitas Muslim Indonesia Makassar, Edisi 6 Vol.1*, hlm. 206.
- Hutagalung, S. M. (2011). Penegakan Hukum di Indonesia: Apakah Indonesia Negara Hukum? *Jurnal Ilmiah Universitas Kristen Indoneisa, Edisi Khusus*, 113.
- Kunto, K. (2005). Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia: Menuju Democratic Governance. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gajah Mada, Vol.8 No.3*, 293.
- Mackor, A. R. (2013). The Presumption of Innocence. *Netherlands Journal of Legal Philosophy, Vol. 3, No. 42*, 167.
- Manan, B. (2006). Kedudukan Penegak Hukum Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, . *Varia Peradilan Majalah Hukum Nomor 243*, 4.
- Mirwan. (2014). Penerapan Asas Accusatoir Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Universitas Airlangga*, 20.
- Nurhassan. (2017). Keberadaan Asas Praduga Tak Bersalah pada Proses Peradilan Pidana : Kajian. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol.17 No.3*, 206.
- R, M. (2012). Pergeseran Kedudukan dan Tugas Penyidik POLRI dengan Perkembangan delik-delik diluar KUHAP. *Jurnal Ilmiah Universitas Riau, Vol.3 No.1*, 6.
- Rompas, E. (2013). Pengawasan dalam proses penyidikan tindak pidana menurut KUHAP. *Jurnal Ilmiah Universitas Sam Ratulangi, Vol.1 No.2*, 69.
- Tim Fakultas Hukum Universitas Indonesia. (2001). Sinkronisasi Ketentuan Perundang-Undangan . Mengenai Sistem Peradilan Pidana Terpadu Melalui Penerapan Asas-Asas-Asas Umum. *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, 87.
- Trimarlina, K. D. (2019). Implementasi Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Pemeriksaan Dalam Proses Penyidikan. *Jurnal Analogi Hukum Universitas Warmadewa Bali, Vol.1 No.3*, 414.
- Zuber, K. (2017). Peranan Lembaga POLRI dalam Penegakan Hukum. *Jurnal Ilmiah Universitas Palembang, Vol 15 No 3*, 384.

## Artikel/Website

- 86&Custume Protection Net. (2018, November 30). *Disuruh Berhenti Tidak Mau Akhirnya Pemuda Pemudi ini Masuk Got*. Diakses dari Youtube.com: <https://www.youtube.com/watch?v=-9jrZQDWAKk>
- 86&Custume Protection Net. (2019, November 19). *Efek Mabuk Pria Ini Jadi Ngawur ke Petugas – 86*. Diakses dari Youtube.com: <https://www.youtube.com/watch?v=NasEg-IFjAA>
- Ahmad Naufal Zulfaroh, “. (2021, Oktober 18). *Polisi Periksa Ponsel Milik Warga*. Diakses dari Youtube: Kompas.com: <https://www.youtube.com/watch?v=4f92Q3Nct-E>
- Aru. (2006, November 16). *Asas Praduga Bersalah tidak bisa diartikan secara Litterlijk*. Retrieved from Hukumonline.com: <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol15745/asas-praduga-tak-bersalah-tidak-bisa-diartikan-secara-iletterlijki>
- Atmasasmita, R. (2009, Desember 14). *Logika Hukum Asas Praduga Tak Bersalah: Reaksi Atas Paradigma Individualistik*. Retrieved from Hukumonline.com: <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4b25f96c2ed41/logika-hukum-asas-praduga-tak-bersalah-reaksi-atas-paradigma-individualistik-br-oleh-romli-atmasasmita-?>
- CNN Indonesia. (2020, Juli 01). *KontraS: Polri Terlibat 921 Kekerasan dan HAM dalam Setahun*. Retrieved from Cnnindonesia.com: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200630211022-12-519281/kontras-polri-terlibat-921-kekerasan-dan-ham-dalam-setahun>
- Drajat, I. R. (2017, April 24). *Memoles Citra Polisi di Televisi*. Retrieved from Remotivi: <https://www.remotivi.or.id/amatan/377/memoles-citra-polisi-di-televisi>
- Equality Human Rights Commission. (2021, Juni 24). *Protects Your Right to Respect for Your Private and Family Life*. Retrieved from Equalityhumanrights.com: <https://www.equalityhumanrights.com/en/human-rights-act/article-8-respect-your-private-and-family-life>
- Harahap, I. (2020, April 9). *Jenis Putusan Pengadilan Perkara Pidana*. Retrieved from Yuridis.id: <https://yuridis.id/jenis-putusan-pengadilan-perkara-pidana/>
- Indra, R. (2019, Juli 14). *Asas-asas Penting dalam Hukum Acara Pidana*. Retrieved from Doktorhukum.com: <https://doktorhukum.com/asas-asas-penting-dalam-hukum-acara-pidana/>

- Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2021). *Sejarah POLRI*. Retrieved from Polri.go.id: <https://www.polri.go.id/tentang-sejarah>,
- Kusumasari, D. (2011, Februari 17). *Hak Privasi*. Retrieved from Hukumonline.com: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hak-privasi-lt4d5605606b42e>
- Makmur, K. L. (2017, November 10). *Ini Bedanya Terlapor, Tersangka, Terdakwa, dan Terpidana*. Retrieved from Hukumonline.com: <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a05720c51f4e/ini-bedanya-terlapor-tersangka-terdakwa-dan-terpidana/>
- Uzzaman, M. N. (2021, September 27). *Perlindungan Data Pribadi: Hak Privasi Menurut Perspektif Hak Asasi Manusia*. Retrieved from Heylawedu.id: <https://heylawedu.id/blog/hak-privasi-menurut-perspektif-hak-asasi-manusia>
- Widyonarko, B. (2017, November 18). *Citra Polisi dari Zaman Kolonial sampai Polri*. Retrieved from Hitsma.fib.ugm.ac.id: <https://histma.fib.ugm.ac.id/2017/12/21/citra-polisi-dari-zaman-kolonial-sampai-polri/>
- Yoga, K. (2016, Juni 30). *Polri Dulu, Kini, dan Esok*. Retrieved from Mdiaindonesia.com: <https://mediaindonesia.com/opini/53739/polri-vs-mafia-hukum>



**Peraturan Perundang-undangan:**

Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

\_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

\_\_\_\_\_, Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia

\_\_\_\_\_, Undang-Undang No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

\_\_\_\_\_, Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

\_\_\_\_\_, Undang-Undang No 15 Tahun 2015 Tentang Pengesahan International Covenant Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Politik dan Sipil)

\_\_\_\_\_, Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

\_\_\_\_\_, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia

\_\_\_\_\_, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No 6 Tahun 2019 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana

Perserikatan Bangsa-Bangsa, *International Covenant on Civil and Political Rights* Tahun 1966

Perserikatan Bangsa-Bangsa, *Universal Declaraton of Human Rights (UDHR)* Tahun 1948